

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena tanah identik dengan kelangsungan hidup masyarakat. Tak hanya sekedar lahan untuk membuat tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi tempat mata pencaharian masyarakat. Hak atas tanah merupakan hak untuk menguasai sebidang tanah yang dapat diberikan kepada perorangan, sekelompok, atau badan hukum. Jenis hak atas tanah bermacam-macam, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain sebagainya.¹

Tanah berfungsi untuk memberikan pengayoman agar tanah dapat merupakan sarana bagi rakyat untuk mencapai penghidupan yang layak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“.²

Tanah memiliki nilai ekonomis, karena tanah merupakan elemen yang tidak mungkin dapat dikesampingkan dalam era pembangunan nasional maupun guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Disamping mempunyai nilai ekonomis, tanah juga memiliki nilai sosial, yang berarti hak atas tanah tidak mutlak, namun negara menjamin dan menghormati hak atas tanah yang diberikan kepada warga negaranya, sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum dalam penguasaan tanah yang dilindungi oleh Undang-Undang. Pengaturan hukum perdata mengenai benda/harta kekayaan

¹Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. 2008. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Penerbit Bandar Maju.

². Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696.

telah dituangkan dalam beberapa undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dan lain sebagainya.³

Pada masa sebelum berlakunya UUPA, hukum tanah di Indonesia masih terkandung corak dualisme dimana peraturan-peraturan agraria terdiri dari peraturan-peraturan yang bersumber pada hukum adat (hukum yang sudah lama melekat di masyarakat Indonesia) dan hukum barat (hukum pemerintahan kolonial belanda). Masyarakat pribumi tunduk pada hukum barat dan hukum adat sedangkan pemerintah kolonial belanda tidak memperdulikan hukum adat yang sudah turun temurun di masyarakat Indonesia.⁴

Hukum tanah adat merupakan hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara otentik atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis. Sejalan dengan KUH Perdata maka hukum tanah barat yang konsepsinya berlandaskan individual liberalisme dengan kebebasan berusaha dan bersaing yang sekedar di batasi menurut keperluan sesuai pertimbangan politik ekonomi, sosial dan kenegaraan pihak yang berkuasa di Negara yang bersangkutan. Hal tersebut bertentangan dengan konsepsi yang mendasari hukum tanah nasional yang tersirat dalam sila-sila pancasila. Oleh karena itu kelangsungan berelakunya hukum tanah barat tersebut tidak dapat dibenarkan, meskipun bentuknya

³Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

⁴ Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Hukum Tanah Nasional*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.

yang tertulis dan dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dalam usaha menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan.⁵

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, kerana merupakan satu-satunya benda kekayaan meskipun mengalami keadaan bagaimana pun akan tetapi dalam keadaan semula, malah terkadang tidak menguntungkan bila dipandang dari segi ekonomis. Kecuali itu dalah suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberiukan penghidupan, dan merupakan tempat dimana para warga dikuburkan jika sudah meninggal. Dalam hukum adat antara masyarakat hukum merupakan keastuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber kepada pandangan yang bersifat religi magis.⁶

Setelah berlakunya UUPA, maka terwujudlah suatu hukum agraria nasional, yang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan memungkinkan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam sebagaimana yang dicita-citakan tersebut. Mengingat sifat dan kedudukan UUPA ini sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria nasional yang baru, maka UUPA ini hanya memuat azas-azas serta soal-soal pokok masalah agraria. Dalam pelaksanaannya undang-undang ini masih memerlukan berbagai undang-undang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya. Implikasi dualisme tanah tidak dapat dipungkiri dengan berlakunya UUPA, hukum agraria mengalami suatu perubahan yang sangat besar, suatu revolusi yang merubah pemikiran dan landasan politik agraria pemerintah kolonial yang dibuat

⁵ Arie S. Hutagalung, et. Al, 2012, *Hukum Pertanahan di Belanda dan di Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar.

⁶ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Rajawali Press, 1986), hlm.211.

demi kepentingan modal besar asing disatu pihak, dengan mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia di pihak lain.⁷

Tujuan adanya UUPA meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, dan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyatnya.⁸

Sesuai dengan Pasal 19 UUPA dijelaskan bahwa adanya kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai instansi tertinggi untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum kepada pemilik tanah dalam hal letak, batas-batas, serta luas tanah, status tanah, objek yang berhak atas tanah serta pemberian surat tanda bukti hak berupa sertifikat. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut, maka hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan termasuk peralihan dan hapusnya hak serta pembebanannya dengan hak-hak lain haruslah didaftarkan, sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi pemegang hak-hak tersebut untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya agar dapat memperoleh kepastian hukum sebagai pemilik hak, sehingga pemilik hak tersebut mengetahui secara jelas tentang keadaan, letak, batas-batas serta luas tanah yang dimilikinya.⁹

⁷ Soni Harsono, 9 Juli 1992. *Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya*, Yogyakarta: Seminar nasional, hal. 6

⁸ Andrian Sutedi, 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

⁹ Linda M. Sahono, "Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal Perspektif*, Edisi No.2, Vol.17, (2012), hlm.92.

Di Indonesia, Sertifikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Adapun pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA meliputi pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak tanah, pemeliharaan hak-hak tanah, dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.¹⁰

Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah Sertifikat, Sertifikat merupakan Alat bukti yang kuat dan autentik kekuatan Sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang Sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas, bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan lain sebagainya.¹¹

Akan tetapi seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memilikisertifikat palsu, dimana data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan yang ada pada buku tanah yang ada. Jumlah sertifikat palsu cukup banyak, sehingga menimbulkan terjadinya kerawanan. Umumnya sertifikat palsu dibuat pada tanah yang masih kosong dan mempunyai nilai tinggi yang menggunakan blangko sertifikat lama. Pemalsuan sertifikat terjadi karena tidak didasarkan pada dasar hak yang benar, sertifikat yang

¹⁰ Pasal 32 dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (Tahun 1997 Nomor, TLN Nomor 3696).

¹¹ Adrian Sutedi, op. cit., hal. 57.

didasarkan pada surat keterangan pemilikan yang dipalsukan, bentuk lainnya berupa stempel BPN dan pemalsuan data pertanahan. Hal tersebut menimbulkan banyak masalah sehingga terkadang terdapat sertifikat dimana objek yang tertera di dalam sertifikat tersebut bukanlah yang seharusnya akan tetapi tanah milik orang lain yang dibuatkan surat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau terdapat kelalaian di dalam penerbitan surat tersebut, kemudian juga terdapat bukti kepemilikan yang sama terhadap dua sertifikat dengan satu objek yang sering disebut dengan sertifikat ganda.

Adapun yang dimaksud dengan sertifikat ganda, yaitu sebidang tanah yang mempunyai lebih dari satu sertifikat, terjadi tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Sertifikat ganda terjadi karena sertifikat tersebut tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut. Apabila peta pendaftaran tanah atau peta situasi pada setiap kantor pertanahan dibuat, dan atau gambar situasi/ surat ukur dibuat dalam peta, maka kemungkinan terjadinya sertifikat ganda akan kecil sekali. Namun apabila terjadi sertifikat ganda, maka harus ada pembatalan dari salah satu pihak dengan memeriksa dokumen pendukung.¹²

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau bisa disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan dikeluarkannya UUPA adalah untuk menyelesaikan dualisme hukum agraria di Indonesia pada saat itu.¹³

Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sesuai dengan

¹² Ali Achmad Chomzah, 2002. *Hukum Pertanahan*, Cet. I ; Jakarta: Prestasi Pustaka, hal. 137.

¹³ Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, op. cit., hal. 204.

perkembangannya, peraturan pemerintah tersebut disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan pemerintah terbaru ini banyak yang disederhanakan tentang persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang diamanatkan UUPA mengandung dua dimensi yaitu kepastian obyek hak atas tanah dan kepastian subyek hak atas tanah. Salah satu indikasi kepastian obyek hak atas tanah ditunjukkan oleh kepastian letak bidang tanah yang berkoordinat geo-referensi dalam suatu peta pendaftaran tanah, sedangkan kepastian subyek diindikasikan dari nama pemegang hak atas tanah tercantum dalam buku pendaftaran tanah pada instansi pertanahan. Secara ringkas, salinan dari peta dan buku pendaftaran tanah tersebut dikenal dengan sebutan Sertifikat Tanah. Namun demikian dalam prakteknya, kepastian hukum hak atas tanah ini kadangkala tidak terjamin sebagaimana yang diharapkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Pamekasan?
2. Mengapa terjadi sertipikat ganda dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Pamekasan dengan kasus nomor 11/LAP.Pengd/II/2019?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah yang di lakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional terkait penerbitan sertifikat ganda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran tanah di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi sertifikat ganda dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Pamekasan .
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah yang di lakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional terkait penerbitan sertifikat ganda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum di bidang pertanahan tentang sengketa pertanahan, selain itu memperluas mengenai peradilan perdata dalam menyelesaikan sengketa pertanahan guna memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam hal terdapat sertipikat ganda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pembuat Undang-undang dibidang pertanahan untuk melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan serta sistem hukumnya sehingga mengurangi terjadinya sengketa pertanahan. Selain itu, sebagai bahan informasi bagi para pelaksana kebijakan dalam mengambil langkah-langkah perumusan kebijakan pertanahan di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui prosedur dari perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam hal terdapat sertipikat ganda. Serta guna memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi akhir Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Manfaat Bagi Pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini dapat di jadikan acuan atau referensi mengenai masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam hal terdapat sertipikat ganda.

5. Manfaat Bagi Masyarakat

Guna memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, khususnya :

- a. Bagi pemilik tanah, agar mengetahui pentingnya pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya.
- b. Bagi penjual dan pembeli tanah sebagai acuan proses jual beli tanah agar sesuai dengan prosedur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pada obyek-obyek yang terkait dengan topik atau pokok pengkajian dalam penulisan hukum ini.

1. Penelitian hukum diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pembuatan sertifikat

tanah. Dan kedepannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur kajian maupun penulisan karya tulis ilmiah.

2. Sebagai sarana pembelajaran penulis untuk meningkatkan analisa dan membangun pola pikir ilmiah dalam menalaah suatu problematika hukum.
3. Sebagai sarana bagi pembaca maupun masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum
4. Sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam upaya pengecekan kembali sertifikat tanah kepada Badan Pertanahan Nasional.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini bahwa salah satu faktor penting adalah terdapat pada metode penelitian yang digunakan. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan dan berfungsi untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif.¹⁴ Metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana. Hlm. 30

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian ini pada awalnya meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian primer lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Pamekasan beralamat di Jl. Jokotole IV No. 25B, Barurambat kota, Kec. Pamekasan untuk melakukan penelitian dikarenakan terdapat munculnya dua sertifikat yang dimiliki oleh orang yang berbeda, yaitu sertifikat ganda.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya. Jenis penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai hambatan-hambatan pendaftaran hak milik atas tanah.

b) Sumber Data Sekunder Yaitu data yang penulis peroleh tidak melalui penelitian yaitu melalui literatur, dokumen lainnya, maupun bahan pustaka lainnya misalnya:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- b) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan hambatan-hambatan dalam praktek pendaftaran hak milik atas tanah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, Glosarium dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari bahan hukum.

b) Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian adalah dengan cara :

1. Observasi

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek. Oleh karena itu didalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data-data yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan dan melakukan pengecekan lokasi tanah untuk melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fadli selaku staf di Kantor

Pertanahan Kabupaten Pamekasan dan melakukan wawancara terhadap pemilik sertifikat ganda.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan rumusan data-data keterangan yang didapat dalam penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, kemudian untuk selanjutnya di tarik kesimpulan.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka, pada bab ini berisi tentang landasan teori. Landasan teori merupakan teori-teori yang memperkuat penelitian yang terdiri dari:

A. Tinjauan Tentang Sistem Pendaftaran Tanah

1. Sistem Pendaftaran Tanah
2. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah

B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah Di Indonesia

1. Pengertian Pendaftaran Tanah
2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah
3. Asas-Asas Pendaftaran Tanah
4. Tujuan Pendaftaran Tanah
5. Prosedur Pendaftaran Tanah
6. Kekuatan Bukti Pendaftaran Tanah

C. Tinjauan Umum tentang Sertifikat Hak Atas Tanah

1. Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah
2. Macam-Macam Sertifikat Hak Atas Tanah
3. Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah

D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Atas Tanah

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Atas Tanah
2. Peran Badan Pertanahan Nasional Penyelesaian Sengketa Atas Tanah

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Bab ini membahas tentang (1) pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Pamekasan, (2) penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kabupaten Pamekasan, dan (3) cara penyelesaian yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasioanl terkait penerbitan sertipikat ganda.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

